

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Homenta, (2015) menjelaskan bahwa seseorang yang memperoleh penghasilan dari setiap pekerjaan yang dia kerjakan akan dikenakan pajak penghasilan pasal 21 oleh pemerintah. Pajak penghasilan karyawan didalam sebuah perusahaan akan dihitung, dilakukan pemotongan dan pencatatan oleh perusahaan dimana karyawan itu berkerja dan selanjutnya perusahaan yang akan menyetorkan kepada pemerintah dan melaporkan ke kantor pelayanan pajak sekitar. Tujuan penelitian ini ialah untuk mencari tahu proses perhitungan pemotongan, pencatatan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2014 yang dilaksanakan CV. Multi Karya Utama yang sesuai dengan Undang –Undang Perpajakan Nomer 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Desa, (2009) berisi tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu pajak yang dikenakan pada orang pribadi yang mempunyai penghasilan baik berupa gaji , honorarium, tunjangan, upah atau pembayaran lainnya. penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mencari tahu bagaimana pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pegawai pada Dinas Bina Marga dan Perairan Kota Bandung yang berlokasi di jalan Cianjur Nomor 4 Kota Bandung . Menurut Pasal 21 Ayat 1 Undang – Undang Nomor. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, dalam hal ini Dinas Bina Marga dan Perairan Kota Bandung yang berhak memberikan pemotongan pajak pasal 21 sebagai pemberi

kerja. dan selian itu Dinas Bima Marga dan Perairan Kota Bandung juga menyetorkan pajak tersebut ke Bank Jabar sebagai bank yang ditunjuk dengan menggunakan SSP, hasil penyetoran pajak kemudian dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Bandung–Kares, supaya tidak mendapatkan sanksi dinas melaksanakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 harus dilaksanakan sebaik mungkin .

## **B. Teori –Teori Tentang Pajak**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **1. Definisi Pajak dari Beberapa Ahli**

Definisi Pajak menurut Soemitro dalam bukunya Resmi (2019) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang –undang (yang dapat dipaksakan )dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “ surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Definisi Pajak yang dikemukakan oleh Djajadiningrat dalam bukunya Resmi (2019) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan

yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum .

## **2. Ciri Ciri yang Melekat pada Definisi Pajak**

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekyatan undang– undang serta aturan pelaksanaanya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.

## **3. Jenis – Jenis Pajak**

Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung yaitu Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain
- b. Pajak Tidak Langsung yaitu Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga

Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif yaitu Pajak yang penggunaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya

- b. Pajak Objektif yaitu Pajak yang pengenaanya memeperhatikan objeknya tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak .

Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara .
- b. Pajak daerah yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah .

#### **4. Macam Macam Pajak yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak**

- a. Pajak Penghasilan (PPh)

Subjek pajak adalah orang pribadi ,warisan atau badan , termasuk bentuk usaha tetap , baik yang berada didalam negeri maupun luar negeri yang mempunyai atau memperoleh penghasilan di Indonesia. Subjek pajak dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

- 1) Dalam negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal di Indonesia , yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik dengan atau tanpa melalui bentuk usaha tetap diluar negeri dan juga warisan yang belum terbagi.

- a) Orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri, dapat dibedakan menjadi :

Orang yang bertempat tinggal di Indonesia atau Orang pribadi yang berada di Indonesia dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Mulai dan berakhirnya kewajiban subjektif orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri . bagi yang bertempat tinggal di Indonesia dimulai saat orang tersebut lahir di Indonesia. Untuk orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 dalam jangka 12 bulan , kewajibannya pajak subjeknya dimulai sejak hari pertama orang tersebut berada di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi berakhir pada saat orang itu meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya

Orang pribadi selain dapat sebagai subjek pajak dalam negeri juga sebagai subjek pajak luar negeri dengan ketentuan sebagai seperti table berikut ;

- b) Kewajiban pajak subjektif badan yang didirikan atau kedudukan di Indonesia dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau berkedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia

**Table 2.1 Subjek Pajak Pribadi**

Keterangan	Subjek Pajak Orang Pribadi	
	Dalam Negeri	Luar Negeri
<b>1. Tempat tinggal</b>	Di Indonesia	Tidak di Indonesia
<b>2. Berada di Indonesia</b>	Lebih dari 283 hari dalam 12 bulan	Tidak Lebih dari 283 hari dalam 12 bulan
<b>3. Dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia</b>	Berminat tinggal di Indonesia	Tidak Berminat tinggal di Indonesia

- c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris, penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti

dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi dan berakhir pada saat warisan itu selesai dibagi.

## 2) Subjek pajak luar negeri

Orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri dapat disebut juga sebagai subjek pajak luar negeri dengan ketentuan

- a. Tidak tinggal di Indonesia
- b. Berada di Indonesia tidak lebih dari 283 hari dalam 12 bulan
- c. Tidak Berminat tinggal di Indonesia

Kewajiban pajak subjektif orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri dimulai pada saat orang pribadi mempunyai hubungan ekonomi dengan Indonesia yaitu menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber di Indonesia dan berakhir pada saat orang pribadi tersebut tidak lagi mempunyai hubungan ekonomi dengan Indonesia .

- a) Badan sebagai subjek pajak luar negeri adalah badan yang berkedudukan diluar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap. Kewajiban pajak subjektif badan sebagai subjek pajak luar negeri dimulai pada saat badan tersebut mempunyai hubungan ekonomi dengan Indonesia dan berhenti pada saat tidak lagi mempunyai hubungan ekonomi dengan Indonesia.

b) Bentuk usaha tetap (BUT) adalah tempat usaha yang seluruh atau sebagian usaha dari suatu perusahaan dijalankan oleh subjek pajak luar negeri. BUT adalah suatu sarana bagi *non resident taxpayer* untuk melakukan bisnis dinegara lain, yang berupa: agen, perwakilan dagang, cabang atau anak perusahaan. Kewajiban pajak BUT dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau meakukan kegiatan dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatann melalui bentuk usaha tetap.

Memahami perbedaan Antara wajib pajak dalam negeri dengan wajib pajak luar negeri.

**Table 2.2 Perbedaan WP Luar Negeri dan WP Dalam Negeri**

No	Keterangan	WP Dalam Negeri	WP Luar Negeri
1	Asal penghasilan	Penghasilan dari dalam maupun luar negeri	Penghasilan dari Indonesia
2	Dasar pengenaan pajak	Penghasilan bruto	Penghasila bruto
3	Penghasilan tariff	Umum	Sepadan
4	Kewajiban	Menyampaikan SPT	Tidak menyampaikan SPT

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sifat kumulatif pada pajak penjualan 1951 direformasikan dengan keluarnya Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yaitu pada reformasi system perpajakan nasional. karena pertimbangan kesiapan pelaksanaannya, maka secara efektif PPN termasuk *noncommulative multistage sales tax* dimaksud bahwa mekanisme pemungutan PPN

dikenakan pada nilai tambah dari barang kena pajak dan jasa kena pajak dengan Undang –Undang Nomor 11 Tahun 1994 yang diperlakukan per 1 Januari 1995 PPN dan PPnBM mengalami perubahan. Perubahan tersebut dengan memberlakukan Undang –Undang PPN dan PPnBM terbaru sejak 1 April 2010.

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

Dasar hukum pengenaan pajak pertambahan nilai dbarang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah adalah undang- undang nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan barang mewah, berlaku ketentuan perubahan ketiga atas Undang- Undang dimaksud Per 1 April 2010.

d. Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, yang dimaksud dokumen sendiri yaitu berupa kertas yang berisikan tulisan serta mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seorang atau pihak pihak yang berkepentingan, benda bermeterai sendiri berupa meterai temple dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh pemerintah

e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan atau bangunan. Dasa hukum Pajak Bumi Dan Bangunan adalah undang- undnag nomor 12 tahun 1985 sbagai diubah dengan Undang –Undang No 12 Tahun 1994.



#### f. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 selanjutnya disebut PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Apabila penghasilan tersebut yang menerima adalah wajib pajak luar negeri maka diatur dalam pasal 26 Undang-Undang pajak penghasilan yang selanjutnya disebut PPh pasal 26. Pembayaran PPh ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan penyetoran dan pelaporan PPh 21 / 26 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pemotong lainnya dapat digunakan oleh wajib pajak untuk dijadikan kredit pajak atas PPh yang teutang pada akhir tahun.

##### 1) Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Mengutip Peraturan Dirjen Pajak No.31/PJ/2009, berikut ini definisi pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan bukan pegawai:

##### a) Pegawai Tetap

Pegawai yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, atau pegawai kontrak.

b) Pegawai Tidak Tetap

Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja. Pekerjaan dihitung berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan/penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

c) Bukan Pegawai

Bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh Pasal 21/ Pph Pasal 26 sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan permintaan.

Setelah menentukan jenis/kategori pegawai, langkah selanjutnya adalah menerapkan norma perhitungannya. di bawah ini adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan pemotongan PPh Pasal 21 terbaru berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015 adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk jumlah penghasilan yang melebihi Rp 450.000 sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 4.500.000,-.
2. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Direktur Jenderal Pajak No. PER 32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.

3. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan di atas.
4. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Pemotongan PPh Pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto.

### 3) Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotongan PPh diartikan sebagai kegiatan memotong sejumlah pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Pemotongan pajak ini dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerima penghasilan. Pihak pembayar bertanggungjawab atas pemotongan dan penyeteroran serta pelaporannya.

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, Anda perlu mengetahui siapa saja pemotong PPh Pasal 21/26, siapa saja penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26, apa saja hak dan kewajiban pihak pemotong dan yang dipotong PPh Pasal 21/26, bagaimana mekanisme pemotongan, dan cara pelaporan PPh Pasal 21/26.

Pemotong PPh Pasal 21/26 terdiri dari:

- a. Pemberi kerja
- b. Bendahara dan pemegang kas pemerintah
- c. Dana pensiun
- d. Orang pribadi pembayar honorarium
- e. Penyelenggara kegiatan

Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah

- a. Kantor perwakilan Negara asing.
  - b. Organisasi- organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan .
  - c. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata – mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- 4) NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak )

NPWP kepanjangan dari nomor pokok wajib pajak ialah untuk mempermudah administrasi pada perpajakan yang digunakan untuk sebagai identitas wajib pajak. Disini NPWP setiap wajib pajak berbeda karena setiap wajib pajak diberikan satu NPWP. Dan juga untuk mempermudah saat pembayaran pajak

#### 5) PTKP

PTKP yang tercantum pada Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 .adalah sebagai berikut :

1. Rp 54.000.000 per tahun atau setara dengan Rp 4.500.000 per bulan untuk wajib pajak orang pribadi.
2. Rp 4.500.000 per tahun atau setara Rp 375.000 per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin (tanpa tanggungan).
3. Rp 4.500.000 per tahun atau setara Rp 375.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis

keturunan lurus atau anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (orang) untuk setiap keluarga

6) SPT ( surat pajak tahunan)

surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak maupun bukan objek pajak harta dan kewajiban, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

